



ABDI CENDEKIA:

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1195-1203

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Penguatan Literasi Hukum Ketenagakerjaan
bagi Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu**

Muhammad Zasmin¹, Nita Nilan Sri Rezky Pulungan², Agusmidah³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email : mhdzasmin@gmail.com¹; nita.pulungan@usu.ac.id²; agusmidah@usu.ac.id³

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis dan kompleks. Rendahnya pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban pekerja, hubungan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, serta perlindungan hukum ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak pekerja di masa mendatang. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode edukatif, partisipatif, dan komunikatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada siswa-siswi kelas akhir SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait hak dan kewajiban pekerja, kontrak kerja, *outsourcing*, magang, pengupahan, serta perlindungan hukum dalam hubungan industrial. Evaluasi kegiatan menunjukkan tingkat antusiasme dan partisipasi peserta yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Selain meningkatkan kesadaran hukum peserta, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi edukatif antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Dengan demikian, penguatan literasi hukum ketenagakerjaan bagi siswa-siswi SMK menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan kerja dan pembangunan sumber daya manusia yang kritis, adaptif, serta memahami hak-haknya sebagai calon pekerja.

Kata kunci: *Dunia Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Hukum, Pengabdian Masyarakat, Siswa SMK.*

***Strengthening Labor Law Literacy for
Students of SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu***

Abstract

This community service activity aims to improve the literacy of labor law for students of SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu as a provision for facing the increasingly dynamic and complex world of work. Students' low understanding of workers' rights and obligations, employment relationships, employment agreements, wages, and labor law protection has the potential to create vulnerability to workers' rights violations in the future. The activity was carried out using a descriptive-qualitative approach with educational, participatory, and communicative methods through socialization, interactive discussions, case studies, and questions and answers. The activity was implemented on final-year students of SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of labor law, particularly regarding workers' rights and

obligations, employment contracts, outsourcing, internships, wages, and legal protection in industrial relations. The evaluation of the activity showed a high level of enthusiasm and participation of participants throughout the activity. In addition to increasing participants' legal awareness, this activity also strengthened educational collaboration between universities and schools in preparing a younger generation who are better prepared to face the world of work. Thus, strengthening employment law literacy for vocational school students is an important part of supporting work readiness and the development of human resources that are critical, adaptive, and understand their rights as prospective workers.

Keywords: *World of Work, Employment Law, Legal Literacy, Community Service, Vocational High School Students.*

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Namun, pada kenyataannya, lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran di Indonesia setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Padahal, pendidikan vokasi pada dasarnya dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan khusus agar mampu terserap secara langsung dalam dunia kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK pada pertengahan tahun 2025 mencapai 8,63% dan menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya di Indonesia (GoodStats, 2025).

Perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks ini tentunya menuntut lulusan SMK bukan hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap aspek hukum ketenagakerjaan. Perubahan pola hubungan kerja modern, seperti sistem *outsourcing*, kerja kontrak, *freelance*, hingga ekonomi digital (*gig economy*), telah melahirkan tantangan baru bagi calon tenaga kerja, khususnya lulusan SMK yang secara langsung dipersiapkan untuk memasuki dunia industri. Kondisi tersebut menyebabkan siswa rentan mengalami berbagai persoalan ketenagakerjaan, seperti ketidakjelasan status kerja, upah yang tidak sesuai ketentuan, jam kerja berlebihan, lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga eksploitasi dalam program magang dan hubungan kerja kontraktual. Oleh karena itu, literasi hukum ketenagakerjaan menjadi kebutuhan penting bagi siswa SMK sebagai bekal awal dalam menghadapi realitas dunia kerja modern.

Hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus sarana menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang. Perlindungan tersebut meliputi hak atas upah layak, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja yang manusiawi, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap hukum ketenagakerjaan menyebabkan lemahnya posisi tawar pekerja pemula dalam hubungan industrial (Mahesa dkk., 2025: 20-24).

SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu merupakan salah satu sekolah vokasi yang berada di kawasan pesisir Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu. Secara geografis, lokasi sekolah berjarak sekitar 65–75 kilometer dari Universitas Sumatera Utara dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 sampai 2 jam perjalanan darat. Sekolah ini memiliki beberapa program keahlian, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO), Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP), serta Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT). Jumlah peserta didik tercatat sebanyak 575 siswa, terdiri atas 313 perempuan dan

262 laki-laki dengan fasilitas 17 ruang kelas. Sebagai sekolah kejuruan yang berorientasi pada kesiapan kerja, sebagian besar siswa memiliki potensi besar untuk langsung memasuki dunia industri setelah menyelesaikan pendidikan. Namun demikian, kesiapan tersebut masih didominasi oleh kemampuan teknis, sedangkan pemahaman terhadap aspek hukum ketenagakerjaan masih relatif terbatas.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah minimnya literasi hukum ketenagakerjaan di kalangan siswa-siswi. Banyak peserta didik belum memahami hak dan kewajiban pekerja, bentuk hubungan kerja, isi dan kedudukan kontrak kerja, mekanisme pengupahan, hingga perlindungan hukum dalam hubungan industrial. Padahal, pemahaman tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak-hak normatif pekerja. Penelitian mengenai pemahaman siswa SMA/SMK terhadap hak-hak pekerja menunjukkan bahwa edukasi hukum ketenagakerjaan perlu diberikan sejak dini sebagai bentuk perlindungan preventif bagi calon tenaga kerja muda (Andianto dkk., 2025: 30-39). Selain itu, perkembangan regulasi dan dinamika ketenagakerjaan modern juga menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum agar generasi muda mampu memahami posisi hukumnya secara tepat dalam hubungan kerja (Sania, 2025: 1-10).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi dan edukasi hukum ketenagakerjaan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu. Kegiatan diarahkan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak-hak pekerja, kewajiban tenaga kerja, bentuk hubungan kerja, perlindungan hukum pekerja, etika profesional, serta kesiapan menghadapi dinamika dunia kerja modern. Pendekatan edukatif dipilih karena dianggap mampu meningkatkan kesadaran hukum peserta didik secara preventif sebelum memasuki dunia kerja secara langsung. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki kesiapan kompetensi kerja, tetapi juga memiliki kemampuan memahami dan melindungi hak-haknya sebagai calon pekerja.

Pelaksanaan pengabdian ini juga sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 8 mengenai *Decent Work and Economic Growth* atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDGs menekankan pentingnya menciptakan kesempatan kerja yang produktif, layak, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk generasi muda yang akan memasuki dunia kerja (Ponto, 2023: 85-96). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang kritis, adaptif, dan memahami hak-haknya dalam hubungan industrial modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu sebagai bekal menghadapi realitas dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.

METODE

Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi hukum dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena kegiatan tidak hanya bertujuan menyampaikan materi hukum ketenagakerjaan, tetapi juga memahami kebutuhan, respons, dan tingkat pemahaman siswa-siswi terhadap persoalan hukum yang mungkin mereka hadapi ketika memasuki dunia kerja. Secara metodologis, kegiatan ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif. Pendekatan partisipatif dipilih karena kegiatan pengabdian masyarakat idealnya tidak menempatkan peserta sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang terlibat dalam proses identifikasi masalah, diskusi, refleksi, dan pencarian solusi (Baum dkk., 2006: 854-857). Hal ini juga sejalan dengan praktik penyuluhan hukum berbasis partisipatif yang menekankan observasi kebutuhan, penyusunan materi kontekstual, ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab sebagai bagian dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Febrian & Rahmi, 2025).

Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2026 di SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, yang beralamat di Jalan Pekan Sialang Buah, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakter SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu sebagai satuan pendidikan vokasi yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Secara geografis, sekolah ini berada di kawasan pesisir Kabupaten Serdang Bedagai dengan jarak sekitar 65–75 kilometer dari Universitas Sumatera Utara dan waktu tempuh sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan darat melalui jalur Medan–Tebing Tinggi.

Target dan Subjek Kegiatan

Target kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas akhir SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu yang dipandang berada pada fase transisi dari pelajar menuju calon pekerja. Subjek kegiatan berasal dari lingkungan SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu yang memiliki beberapa program keahlian, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, serta Agribisnis Perikanan Air Tawar. Jumlah peserta didik di sekolah tersebut sebanyak 575 siswa, terdiri atas 313 siswa perempuan dan 262 siswa laki-laki. Sasaran utama kegiatan diarahkan kepada siswa-siswi yang membutuhkan pemahaman dasar mengenai hukum ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja, jaminan sosial, magang, *outsourcing*, serta perlindungan hukum bagi pekerja pemula.

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai waktu, tempat, peserta, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tim juga melakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan siswa-siswi mengenai pemahaman hukum ketenagakerjaan. Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi, modul singkat, slide presentasi, serta contoh kasus sederhana yang relevan dengan dunia kerja.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan melalui penyuluhan dan pendidikan hukum ketenagakerjaan dengan tema peralihan dari pelajar ke pekerja dalam menghadapi dunia kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Materi yang disampaikan meliputi prinsip dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja, status hubungan kerja, sistem kerja kontrak, *outsourcing*, magang, pengupahan, waktu kerja, cuti, jaminan sosial, serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja muda. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif agar peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus contoh praktis.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab. Melalui diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan yang sering terjadi di dunia kerja, seperti kontrak kerja yang merugikan, potongan gaji sepihak, jam kerja berlebihan, ketidakjelasan status kerja, serta minimnya perlindungan bagi pekerja magang. Metode studi kasus digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam mengenali bentuk pelanggaran hak pekerja dan memahami langkah penyelesaian secara sederhana. Sementara itu, sesi tanya jawab dan konsultasi diarahkan untuk memberikan penjelasan praktis mengenai persoalan hukum ketenagakerjaan yang dekat dengan pengalaman atau kekhawatiran peserta.

Pada tahap evaluasi, tim pengabdian menilai ketercapaian kegiatan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, kualitas pertanyaan yang diajukan, tanggapan peserta dalam diskusi, serta kemampuan peserta memahami contoh kasus yang diberikan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan melihat perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui respons lisan, refleksi singkat, dan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung. Pada tahap pelaporan, tim menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

yang memuat proses kegiatan, dokumentasi, hasil evaluasi, kendala pelaksanaan, serta rekomendasi tindak lanjut.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi lembar observasi, daftar hadir peserta, pedoman diskusi, bahan presentasi, modul sosialisasi, dokumentasi kegiatan, serta catatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, diskusi interaktif, tanya jawab, studi kasus, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta persoalan hukum ketenagakerjaan yang paling dekat dengan kebutuhan peserta. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus bahan pendukung dalam penyusunan laporan pengabdian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasi hasil observasi, tanggapan peserta, pertanyaan dalam diskusi, serta catatan pelaksanaan kegiatan. Model analisis kualitatif yang digunakan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2014: 12–14). Kondensasi data dilakukan dengan memilah informasi penting yang berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap hukum ketenagakerjaan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif mengenai proses kegiatan dan respons peserta. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan sosialisasi mampu memperkuat literasi hukum ketenagakerjaan siswa-siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Penguatan Literasi Hukum Ketenagakerjaan bagi Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu*” dilaksanakan secara langsung di SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Senin, 11 Mei 2026, pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB. Kegiatan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum. dan Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, S.H., M.Kn., serta 12 mahasiswa sebagai tim pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab mengenai hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait peralihan siswa dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum ketenagakerjaan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman siswa-siswi mengenai hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja, sistem kontrak, *outsourcing*, magang, serta perlindungan hukum bagi pekerja pemula. Temuan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian serupa di SMKN 7 Palu yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum ketenagakerjaan penting diberikan kepada siswa sekolah menengah kejuruan agar mereka memahami posisi hukum pekerja, pengusaha, dan hubungan kerja sebelum memasuki dunia kerja (Lasatu & Friskanov, 2024: 293-301).

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan

No.	Aspek Evaluasi	Hasil Evaluasi
1	Antusiasme peserta terhadap kegiatan	90% antusias dan 10% kurang aktif
2	Keaktifan peserta dalam kegiatan	80% aktif dan 20% sangat aktif
3	Peran tim sebagai fasilitator partisipasi	20% setuju dan 80% sangat setuju
4	Manfaat kegiatan bagi peserta	10% setuju dan 90% sangat setuju

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat antusiasme peserta tergolong sangat tinggi. Sebanyak 90% peserta menunjukkan antusiasme terhadap kegiatan, sedangkan 10% peserta tergolong kurang aktif. Tingginya antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi hukum ketenagakerjaan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan siswa-siswi SMK, terutama karena mereka berada pada tahap akhir pendidikan dan akan menghadapi dunia kerja. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan hukum bagi generasi muda penting dilakukan secara kontekstual agar peserta mampu memahami persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sosial dan masa depan pekerjaannya (Mulyanto & Herasmus, 2025).

Keaktifan peserta juga terlihat dari keterlibatan mereka dalam sesi diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Sebanyak 80% peserta merasa aktif, sedangkan 20% peserta merasa sangat aktif dalam kegiatan. Data ini menunjukkan bahwa metode edukatif, partisipatif, dan komunikatif yang digunakan dalam kegiatan cukup efektif untuk mendorong keterlibatan peserta. Dalam konteks pengabdian masyarakat, pendekatan partisipatif penting karena peserta tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam memahami masalah dan mencari solusi atas persoalan yang dibahas (Aditia & Muhimah, 2025: 1-16).

Materi yang paling menarik perhatian peserta berkaitan dengan perjanjian kerja, upah, jam kerja, magang, *outsourcing*, dan perlindungan hukum bagi pekerja pemula. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta belum memahami bahwa hubungan kerja tidak hanya berkaitan dengan diterima atau tidaknya seseorang dalam pekerjaan, tetapi juga menyangkut status hukum, hak normatif, kewajiban, serta perlindungan yang melekat dalam hubungan industrial. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami pentingnya membaca perjanjian kerja secara cermat, mengenali klausul yang berpotensi merugikan, serta mengetahui hak dasar pekerja. Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai perlindungan hukum bagi siswa SMK yang mengikuti praktik kerja lapangan, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi peserta didik vokasi karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan dunia kerja (Haryanti dkk., 2023: 36-46).

Tabel 2. Capaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Capaian Kegiatan	Bentuk Hasil
1	Peningkatan pemahaman hukum ketenagakerjaan	Peserta memahami dasar hak dan kewajiban pekerja
2	Penguatan kesadaran hukum	Peserta menyadari pentingnya membaca dan memahami kontrak kerja
3	Peningkatan kesiapan memasuki dunia kerja	Peserta memahami risiko hubungan kerja modern
4	Tersedianya bahan edukasi	Materi presentasi dan modul sosialisasi hukum ketenagakerjaan
5	Terbangunnya kolaborasi kelembagaan	Kerja sama edukatif antara perguruan tinggi dan sekolah

Berdasarkan Tabel 2, kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, meningkatnya pemahaman siswa-siswi mengenai hukum ketenagakerjaan sebagai bekal awal memasuki dunia kerja. Kedua, tumbuhnya kesadaran peserta mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban pekerja. Ketiga, meningkatnya kesiapan siswa dalam menghadapi sistem kerja modern, seperti kontrak kerja, *outsourcing*, magang, pekerja lepas, dan ekonomi digital. Capaian ini relevan dengan tujuan *SDGs* 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan pekerjaan layak bagi semua orang.

Dari sisi fasilitasi, 20% peserta menyatakan setuju dan 80% peserta menyatakan sangat setuju bahwa tim pelaksana mampu mendorong partisipasi aktif peserta. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan fasilitator dalam membangun suasana dialogis. Model penyampaian yang tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga disertai diskusi dan studi

kasus, membantu peserta memahami persoalan hukum ketenagakerjaan secara lebih konkret. Dalam analisis kualitatif, proses interpretasi data semacam ini dapat dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles dkk., 2014: 12–14).



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan bersama Pihak Sekolah

Tingkat kebermanfaatan kegiatan juga menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebanyak 10% peserta menyatakan setuju dan 90% peserta menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan manfaat. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil menjawab kebutuhan peserta terhadap pengetahuan dasar mengenai hukum ketenagakerjaan. Manfaat tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis karena peserta memperoleh pemahaman tentang bagaimana mengenali potensi pelanggaran hak pekerja, memahami isi kontrak kerja, dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Secara analitis, tingginya respons positif peserta dapat dipahami karena siswa-siswi SMK merupakan kelompok yang berada dalam fase transisi menuju dunia kerja. Pada fase ini, mereka membutuhkan pengetahuan yang tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan hukum, etika kerja, dan kesiapan menghadapi hubungan industrial. Pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja muda dalam memasuki pasar kerja (Setiawan, 2025: 891-902). Oleh karena itu, literasi hukum ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari kesiapan kerja siswa SMK, khususnya agar mereka tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu memahami hak, kewajiban, dan posisi hukumnya sebagai calon pekerja.



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat Penghargaan kepada Peserta Terbaik

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum ketenagakerjaan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu telah berjalan efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari tingginya antusiasme peserta, keterlibatan aktif dalam diskusi, respons positif terhadap peran fasilitator, serta pengakuan peserta terhadap manfaat kegiatan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi siswa kelas akhir yang akan segera memasuki dunia kerja. Penyuluhan lanjutan dapat difokuskan pada simulasi membaca kontrak kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perlindungan pekerja magang, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta strategi menghadapi praktik kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program “*Penguatan Literasi Hukum Ketenagakerjaan bagi Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu*” telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek dasar hukum ketenagakerjaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa-siswi SMK sebagai calon tenaga kerja membutuhkan tidak hanya keterampilan teknis dan akademis, tetapi juga pemahaman hukum yang memadai agar mampu menghadapi dinamika hubungan industrial secara lebih kritis dan adaptif. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja, sistem kerja kontrak, *outsourcing*, pengupahan, waktu kerja, hingga bentuk perlindungan hukum bagi pekerja pemula.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan tingginya tingkat antusiasme dan partisipasi peserta selama proses sosialisasi berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi hukum ketenagakerjaan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan siswa-siswi SMK yang berada pada fase transisi menuju dunia kerja. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran hukum peserta terhadap pentingnya memahami isi kontrak kerja, mengenali potensi pelanggaran hak pekerja, serta memahami posisi hukum pekerja dalam hubungan industrial modern. Dengan demikian, penguatan literasi hukum ketenagakerjaan dapat menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapan kerja generasi muda yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan kemampuan berpikir kritis.

Selain memberikan manfaat edukatif bagi peserta, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya Tujuan 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas dan aplikatif, seperti simulasi perjanjian kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perlindungan pekerja magang, serta edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, dan instansi terkait juga perlu terus diperkuat agar siswa-siswi SMK memperoleh kesiapan yang lebih komprehensif dalam menghadapi realitas dunia kerja di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, D., & Muhimah, U. U. (2025). Legal Literacy Field School as An Innovation in Promoting Legal Awareness for Vocational High School Students. *Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi*, 4(4), 1–16. <https://jki.ub.ac.id/index.php/jki/article/view/663>
- Andianto, M. M., Masyitoh, A., Ajjah, & Prakoso, F. A. (2025). Pemahaman Siswa SMA/SMK Kota Pasuruan Terhadap Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja berdasarkan UU

- Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 30–39. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/hukum/article/view/71>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (15th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory Action Research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <http://dx.doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Febrian, H., & Rahmi, S. Y. (2025). Sosialisasi Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Lubuak Kandang melalui Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(3), 183–189. <https://studentresearchhub.org/ahkamserve/article/view/197>
- GoodStats. 2025. Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Tertinggi per Agustus 2025 <https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-pengangguran-lulusan-smk-tertinggi-per-agustus-2025-llhi5>
- Haryanti, A., Santoso, B., & Dindin. (2023). Legal Protection for Vocational School Students Undertaking Practical Work Experience During the Pandemic. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 36–46. <https://scholarhub.uny.ac.id/civics/vol20/iss1/4/>
- Lasatu, A., & Friskanov, I. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hukum Ketenagakerjaan bagi Siswa di SMKN 7 Palu. *JAIM: Jurnal Abdi Masyarakat*, 7(2), 293–301. <https://pdfs.semanticscholar.org/26d6/dc18a495c7258f26e099898b736586a832b1.pdf>
- Mahesa, N., Amelia, R. N., & Putri, T. S. (2025). Penegakan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Eksploitasi Generasi Z dalam Kontrak Kerja Jangka Pendek (PKWT): Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Information Systems and Management*, 4(6), 20–24. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/1235>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Mulyanto, & Herasmus, H. (2025). Penyuluhan Hukum kepada Siswa PKBM Insan Cendikia Batam. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 383–387. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm/article/view/1431>
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan Produktivitas dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan Ke-8 Sustainable Development Goals). *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 7(1), 85–96. <https://jurnal.kemendag.go.id/JCN/article/view/792>
- Sania, I. K. (2025). Perkembangan dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan terhadap Dinamika Regulasi dan Hak-Hak Pekerja. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1–10. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3656>
- Setiawan, R. B. (2025). High Quality Vocational Programs: A Solution for Alleviating Acute Poverty and Achieving 8% Economic Growth Amid Indonesia's Demographic Bonus. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(4), 891–902. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32081>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.